



**DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44/SK/K.DKPP/SET.06/IX/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), diperlukan pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
- b. bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di DKPP yang efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di DKPP; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua DKPP tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di DKPP.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 140);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 72);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 166);
9. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 772).

Memperhatikan : Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor: 020/SK/K.DKPP/SET-06/VIII/2020 tentang Daftar Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan DKPP dengan susunan dan kedudukan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : PPID DKPP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut;
- a. Pembina dan Pengarah PPID:
 - 1. Melakukan pembinaan terhadap pengelola informasi dan dokumentasi serta seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai mekanisme yang ditentukan di lingkungan Dewan Kehormatan Penyelenggara DKPP;
 - 2. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - 3. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang ditetapkan oleh PPID;
 - 4. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik Yang Dikecualikan; dan
 - 5. Melakukan monitoring dan pembinaan kepada PPID.
 - b. Penanggung Jawab/Atasan PPID:
 - 1. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID;
 - 2. Menerima keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
 - 3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
 - 4. Dapat melakukan penolakan memberikan informasi dan dokumentasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5. Mewakili DKPP dalam sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
 - c. Tim Pertimbangan PPID:
 - 1. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Informasi Publik yang dikecualikan; dan
 - 2. Menyelesaikan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terkait dengan PPID.
 - d. PPID:

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh publik; dan
 7. Mengkoordinir pelaksanaan yang dilakukan oleh Pengelola Informasi Dan Dokumentasi.
- e. Pengelola Informasi dan Dokumentasi
1. Melakukan pengumpulan dan pengelolaan informasi di masing-masing Bagian untuk PPID;
 2. Menyerahkan bentuk fisik, *softfile* dan/atau daftar informasi yang telah dikumpulkan dan diolah kepada PPID dalam rangka pelayanan informasi publik;
 3. Melakukan pendokumentasian dan mengarsipkan informasi publik;
 4. Menyusun draf surat pertimbangan kepada PPID terhadap adanya keberatan dan/atau proses sengketa yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
 5. Melakukan layanan informasi bila masyarakat membutuhkan informasi melalui kanal atau perangkat lainnya.
- f. Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi:
1. Mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi dari seluruh unit kerja; dan
 2. Melakukan pengolahan, penataan, dan penyimpanan informasi yang diperoleh dari seluruh unit kerja.
- g. Tim Penghubung:
- Mengumpulkan dan menyerahkan informasi kepada Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- h. *Desk* Informasi:
1. Bekerjasama dengan anggota tim penghubung untuk menerima informasi dari Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 2. Menerima formulir dan permohonan informasi dari pemohon informasi berdasarkan permohonan tertulis;

- 3. Melakukan registrasi dan penerusan formulir informasi dari pemohon informasi kepada PPID;
- 4. Menyerahkan surat tanggapan tertulis dari Atasan PPID kepada pemohon informasi;
- 5. Menyerahkan informasi (dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*) kepada pemohon informasi berdasarkan persetujuan atau perintah PPID;
- 6. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi kepada PPID; dan
- 7. Melayani masyarakat pencari informasi yang datang langsung atau melalui kanal DKPP.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) DKPP.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2026

KETUA,



HEDDY LUGITO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA
PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 44/SK/K.DKPP/SET.06/IX/2026
TANGGAL : 22 September 2026
TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	Heddy Lugito	Ketua DKPP	Pembina dan Pengarah PPID
2.	Muhammad Tio Aliansyah	Anggota DKPP	Pembina dan Pengarah PPID
3.	Ratna Dewi Pettalolo	Anggota DKPP	Pembina dan Pengarah PPID
4.	J. Kristiadi	Anggota DKPP	Pembina dan Pengarah PPID
5.	I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi	Anggota DKPP	Pembina dan Pengarah PPID
6.	Syarmadani	Sekretaris DKPP	Penanggung Jawab/ Atasan PPID
7.	Unu Putra Herlambang	Tenaga Ahli	Tim Pertimbangan PPID
8.	Hopsah Varah Dini	Tenaga Ahli	Tim Pertimbangan PPID

9.	Cholidin Nasir	Tenaga Ahli	Tim Pertimbangan PPID
10.	Subhan Rizky Firdhausyah	Tenaga Ahli	Tim Pertimbangan PPID
11.	Teten Jamaludin	Tenaga Ahli	Tim Pertimbangan PPID
12.	Siti Fatimah Siagian	Tenaga Ahli	Tim Pertimbangan PPID
13.	Riska	Tenaga Ahli	Tim Pertimbangan PPID
14.	Kartika Tusti Nugraheni	Tenaga Ahli	Tim Pertimbangan PPID
15.	Muhamad Hasan Muaziz	Tenaga Ahli	Tim Pertimbangan PPID
16.	Herdis Muhammad Husein	Tenaga Ahli	Tim Pertimbangan PPID
17.	Paulus Dedi Does Malau	Tenaga Ahli	Tim Pertimbangan PPID
18.	Rahman Yasin	Tenaga Ahli	Tim Pertimbangan PPID
19.	Sakur	Tenaga Ahli	Tim Pertimbangan PPID
20.	Hani Yuliasih	Tenaga Ahli	Tim Pertimbangan PPID
21.	Bugi Kurnia Widiyanto	Kepala Bagian Hubungan Masyarkat, data dan Teknologi Informasi	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
22.	Haq Abdul Gani	Kepala Bagian Fasilitas Persidangan & Teknis	Pengelola Informasi dan

		Putusan	Dokumentasi
23.	Afif Amirullah	Kepala Fasilitas Teknis Pengaduan	Pengelola Informasi dan Dokumentasi
24.	Johnly Pedro Merentek	Kepala Bagian Hukum, Kerjasama & Kepegawaian	Pengelola Informasi dan Dokumentasi
25.	Enjang Muhidin	Kepala Bagian Perencanaan dan Umum	Pengelola Informasi dan Dokumentasi
26.	Ferry Yanuar Martedi	Kepala Bagian Fasilitas Tim Pemeriksa Daerah	Pengelola Informasi dan Dokumentasi
27.	Hening Woro Hastami	Kasubbag Keuangan	Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi
28.	MHD. Idris Evrisal Lubis	Kasubbag Perlengkapan dan Rumah Tangga	Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi
29.	Anang Setiawan	Kasubbag Tata Usaha dan Protokol	Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi
30.	Esih Nurkesih	Analisis Hukum Ahli Muda, Koordinator Subbagian Hukum	Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi
31.	Wahyu Subrata	Kasubbag Kepegawaian	Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi
32.	Nur Anita Setyawati	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi

33.	Ruhaya Umatjina	Kasubbag Verifikasi Pengaduan I	Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi
34.	Hartati	Kasubbag Verifikasi Pengaduan II	Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi
35.	Rahmat Erianto	Kasubbag Fasilitasi Penyiapan Perkara	Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi
36.	M. Farli Moerdapi	Kasubbag Risalah Sidang dan Penyusunan Putusan	Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi
37.	Tanti Enastiwi	Kasubbag Tindak Lanjut Putusan	Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi
38.	Agus Sugiarto	Kasubag Sarana Prasarana dan Pengamanan Persidangan	Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi
39.	Sumarjaya	Kasubag Penjadwalan dan Pemanggilan Persidangan	Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi
40.	Dedek Harianto	Kasubbag Fasilitasi TPD Wilayah I	Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi
41.	Sahisnu Galih Andaru	Kasubbag Fasilitasi TPD Wilayah II	Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi

42.	Henki Ade Putra	Kasubag Pengelolaan Arsip, Data dan Sistem Informasi	Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi
43.	Kiki Ari Suwandi Kosasih	Penata Layanan Operasional	Tim Penghubung
44.	Abdul Rozak	Penata Layanan Operasional	Tim Penghubung
45.	Onesiforus Marbun	Penelaah Teknis Kebijakan	Tim Penghubung
46.	Muhammad Anis	Penelaah Teknis Kebijakan	Tim Penghubung
47.	Willy Gebriel Siahaan	Penata Layanan Operasional	Tim Penghubung
48.	M. Rayhan Shafaqa	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	Tim Penghubung
49.	Khaliza Tiar	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- undangan	Tim Penghubung
50.	Nailah Hanifah	Analisis Hukum Ahli Pertama	Tim Penghubung
51.	Muhammad Rizky Wibowo	Pranata Komputer Ahli Pertama	Desk Informasi
52.	Fatwa Pria Sembada	Pengadministrasi Perkantoran	Desk Informasi
53.	Aulia Fajri Satria	Penata Layanan Operasional	Desk Informasi

54.	Rizky Solihansyah	Analisis Hukum Ahli Pertama	Desk Informasi
55.	Mahesa Romario Junius Putera	Analisis Hukum Ahli Pertama	Desk Informasi
56.	Adisti Nur Rizky Oktaviani	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pratama	Desk Informasi
57.	Rikki Pati Hutasoit	Pengawas Penyelenggara Pemilu	Desk Informasi

KETUA,



HEDDY LUGITO